



SUBYEK				MAJALAH :	2013																										
KORAN / MAJALAH	KOMPAS	POS KOTA		GATRA																											
	SEPUTAR INDONESIA	RAKYAT MERDEKA		TEMPO																											
	KORAN TEMPO	REPUBLIKA		INVESTOR INDONESIA																											
	✓ INVESTOR DAILY	MEDIA INDONESIA		WARTA EKONOMI																											
	BISNIS INDONESIA	SUARA PEMBARUAN																													
	KONTAN	NERACA																													
HALAMAN	6																														
TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES																			

PERCEPAT PENGADAAN LAHAN TOL TRANS JAWA

PU Usulkan Pembentukan Unit Kerja Pembebasan Lahan

Oleh Eko Adityo Nugroho

► **JAKARTA** – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan pembentukan unit kerja khusus pembebasan lahan tol kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Unit kerja tersebut diharapkan menangani pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol Trans Jawa.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, unit kerja khusus dapat dibentuk dengan hanya mengeluarkan surat keputusan (SK) kepala BPN. Sedangkan pembentukan kedudukan khusus harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

"Saya sudah minta ada petugas khusus dengan SK kepala BPN untuk level yang cukup tinggi khusus untuk mengurus pembebasan tanah, dan kepala BPN sudah setuju," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Djoko menuturkan, selama ini upaya pembebasan lahan dinilai kurang optimal, lantaran hal itu dianggap bukan sebagai prioritas utama. Apalagi, panitia pengadaan tanah (P2T) yang juga merangkap sebagai aparat di pemerintahan daerah memiliki tugas lain.

"Ketika pemerintah pusat ngotot untuk segera dituntaskan, tapi di satu sisi itu bukan prioritas, sehingga tidak berjalan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono sempat meminta agar pembangunan jalan bebas hambatan Trans Jawa dipercepat. Apalagi proyek tersebut diharapkan sudah dapat beroperasi pada 2014.

Namun begitu, tiga dari sembilan ruas jalan tol Trans Jawa diperkirakan tidak bisa diselesaikan pada 2014, karena masalah pembebasan tanah. Ketiga ruas tol tersebut antara lain adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.

Kendati demikian, Djoko mengatakan, pihaknya telah menghubungi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo

untuk mendorong para kepala daerah di wilayahnya agar mempercepat pembebasan tanah tol Trans Jawa. Dengan dorongan gubernur diharapkan tim P2T di Jawa Tengah dapat bekerja lebih maksimal.

"Gubernur Jawa Tengah mengakui selama ini baru mendorong pembebasan lahan untuk wilayah Semarang ke selatan. Tetapi, pembebasan lahan dari arah Semarang ke barat sudah dijanjikan juga dipercepat," papar dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto menambahkan, upaya untuk mempercepat pembangunan jalan tol adalah dengan memperkuat sistem yang telah ada, seperti peran P2T, BPN, pimpinan daerah, Dinas Pekerjaan Umum, termasuk peningkatan upaya sosialisasi program kepada masyarakat yang terkena dampak. De-

ngan peningkatan sistem yang ada diharapkan dapat dihindari keterlambatan-keterlambatan pembebasan lahan.

"Apalagi, peraturan perundang-undangannya sudah ada dan memenuh," ujar dia.

Dipertanyakan

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Tol Indonesia Fachrud Rochman mengungkapkan, usulan pemerintah untuk meminta BPN membentuk unit khusus pembebasan lahan masih belum jelas. Hal itu karena pemerintah belum menentukan penggunaan aturan pembebasan lahan, mengingat saat ini ada dua Undang-Undang (UU) Pembebasan Lahan yang digunakan, yakni UU No 2/2012 dan UU No 36/2005.

"Upaya itu mau mengacu undang-undang yang mana? Pemerintah seharusnya memiliki rencana yang lebih jelas mengenai undang-undang yang akan digunakan," ungkap dia kepada *Investor Daily* di Jakarta, Minggu (10/2).

Menurut dia, penggunaan undang-undang amat menentukan proses pembebasan tanah ke depannya. Apalagi, tata cara pembebasan lahan dalam dua undang-undang itu berbeda. "Kalau pakai undang-undang lama unit kerja khusus itu tidak cocok. Sedangkan undang-undang baru harus mengulangi semua langkah dari awal. Jadi, mana yang dipilih pemerintah?" ungkap Fachrud.

Progres Pengadaan Lahan

No	Ruas Tol	Panjang Tol yang Didanai Kementerian PU	Realisasi
1	Solo-Matigani seksi I	29,77 KM	70%
2	Solo-Matigani seksi II	29,9 KM	77%
3	Matigani-Solo seksi I	88,18 KM	75,85%
4	Matigani-Solo seksi II	36,45 KM	33,59%
5	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	72,12 KM	59,54%
6	Pekanbaru-Kandis	58 KM	0
7	Kandis-Dumai	79,8 KM	0
8	Cileunyi-Sumedang-Dawuan	36,1 KM	23,6%
9	Pasir Koba-Sreng	12,51 KM	10,05%
10	Pandaan-Malang	38,6 KM	9,39%
11	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu	panjang tidak	

Sumber: Kementerian PU (diolah)